



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Juni 2012

Halaman: 13

Jogja & Sleman WTP

Pamuji Tri Nastiti

JOGJA-Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah DIY diserahkan BPK Perwakilan DIY, Kamis (31/5).

Hasilnya, Kota Jogja dan Kabupaten Sleman dinilai Wa-

jar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian.

Oleh BPKP DIY, dua laporan itu diserahkan kepada masing-masing Ketua DPRD Kota/Kabupaten di DIY berdasarkan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kepala BPKP DIY Sunarto mengatakan laporan yang di-

serahkan terdiri dari LHP atas laporan keuangan tahun anggaran 2011, LHP atas kepatuhan, dan LHP atas sistem pengendalian intern. "Setelah penyerahan LHP, kami berharap Kota/Kabupaten segera menyusun rencana aksi berupa perbaikan administrasi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan," ujarnya di auditorium daerah Wirobrajan, kemarin.

● Lebih lengkap Hal 19

Jogja &...

Walikota Jogja Haryadi Suyuti menyampaikan catatan dalam LHP Kota Jogja yakni terkait dengan paragraf penjelasan tentang aset Terminal Giwangan yang saat ini dalam proses hukum. Laporan keuangan itu menuntut Pemkot untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan standar laporan tahun berikutnya.

"Jogja sudah tiga kali berturut-turut memperoleh WTP. Ini menjadi tantangan untuk segera memperbaiki catatan terkait dengan aset Terminal Giwangan," katanya.

Bupati Sleman mengaku hasil laporan keuangan dan administrasi Pemkab merupakan kinerja tim. Ke depan ia berharap standar laporan dan catatan-catatan yang ada segera dapat dibenahi. "Kinerja administrasi dan keuangan yang lebih baik lagi menjadi tantangan untuk laporan BPK tahun depan," katanya. (pamuji@harian-jogja.com).

Kepada Y...
ota Yogya
Walikota
rtaris Dae

LHP-LKPD BPK 2011

○ Wajar Tanpa Pengecualian

*Kota Jogja, dengan catatan

■ Penanganan perkara gugatan perdata ganti rugi akibat pemutusan kerjasama BOT, opini tahun lalu dan aset tetap yang belum dilakukan penyusutan sesuai standar akuntansi pemerintahan

*Kabupaten Sleman, dengan catatan

■ Peyajian investasi nonpermanen belum menggunakan metode nilai bersih
■ Aset tetap belum diatur sesuai standar

○ Wajar Dengan Pengecualian

*Kabupaten Bantul, dengan catatan

■ Penggunaan langsung dana Jamkesmas
■ Penatausahaan dana bergulir
■ Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang tidak memadai
■ Selisih aset tetap hasil inventarisasi

yang tidak dijelaskan

*Kabupaten Kulonprogo, dengan catatan

■ Penyajian aset tetap
■ Pendapatan retribusi belum sesuai akuntansi pemerintahan

*Kabupaten Gunungkidul, dengan catatan

■ Tidak ada pencatatan memadai atas mutasi pengeluaran persediaan di gudang farmasi Dinas Kesehatan, RSUD Wonosari dan instalasi laboratorium
■ Tidak tersedianya laporan hasil neraca awa;
■ Penerimaan klaim askes
■ Penyalahgunaan perjalanan dinas di Sekretaris DPRD

Sumber: BPK Perwakilan DIY

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Perekonomian dan Pemb...	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo...			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005